

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional adalah fenomena yang dikaji menjadi sebuah disiplin ilmu dan lebih menekankan kepada aktor internasional serta fenomenalain dalam cakupan yang sangat luas dan juga persoalan filsafat bersifat kontemplatif. Tujuan dari hasil disiplin ilmu yang dikaji terhadap intelektual adalah dunia yang diubah menjadi lebih baik melalui cara menghilangkan kekejaman dalam perang, meskipun perhatian terhadap konflik dan perang masih terlibat dalam studi hubungan internasional (Burchill dkk., 2021:11).

Seiring terjadinya revolusi peradaban, hubungan internasional memiliki istilah dalam relasi antar negara dan disebut sebagai politik nya dunia, bukan hanya menggambarkan relasi antar negara saja, namun juga meliputi aktor non-negara seperti yang mencakup dalam bidang keamanan, pendidikan, sosial dan budaya, politik, serta ekonomi. Hubungan internasional menjelaskan suatu multi disiplin ilmu yang mengkaji macam-macam hubungan politik antar negara dengan berbagai hubungan interaksi multilateral pada level global (Sinulingga, 2016:18).

Dalam hubungan antar negara, sebagai suatu wadah interaksi hubungan internasional yang terdiri atas dua atau lebih aktor negara dan atau aktor non-negara, yang dapat diwujudkan melalui kerja sama internasional. Kerja sama

internasional adalah suatu aktivitas dalam hubungan internasional, sebagai prinsip dalam pembangunan berkelanjutan dalam sebuah peradaban. Kerja sama internasional dapat dilaksanakan oleh antar negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, dan atau organisasi internasional dengan organisasi internasional. Saat ini, perkembangan dalam kerja sama internasional terhadap entitas nasional dengan entitas internasional seperti NGO, institusi, Pemerintah Daerah dll (Pramudianto, 2021:72).

Dengan hadirnya globalisasi dan teknologi yang berkembang secara signifikan telah mendorong aktor-aktor sub-nasional memulai berbagai strategi yang bertujuan untuk menarik sumber daya global seperti investasi, pengetahuan, atau tenaga terampil dan dalam pemenuhan kepentingan daerahnya (Kaiser, 2005:26). Aktivitas lintas batas negara akan lebih mudah dilakukan dan dilakukan oleh beragam aktor, tidak hanya oleh negara tetapi aktor subnasional juga dapat melakukan hubungan luar negeri (El- Dessouki, 2018:10). Kehadiran globalisasi mendorong aktor sub-negara untuk melakukan aktivitas paradiplomasi dengan sub-negara lain.

Paradiplomasi yaitu singkatan dari *parallel diplomacy* dari kata “para” yang artinya memiliki kesetaraan, berdekatan, berdampingan, dan atau bersebelahan dalam diplomasi. Paradiplomasi ditekankan oleh (Tavares, 2016:8), diplomasi dalam aktivitas aktor sub-negara yang dapat bertujuan untuk melengkapi, mendukung, memperbaiki bahkan melanjutkan diplomasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Di Indonesia, peran paradiplomasi

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 terkait Perjanjian internasional, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 terkait mengatur pembagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengelola hubungan luar negeri daerah dan kerja sama luar negeri dengan pihak asing (PPID Kemlu RI, 2019). Adapun regulasi atau peraturan mengenai kerja sama daerah dengan pemerintah di luar negeri seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020. (peraturan.go.id, 2020). Dalam peraturan tersebut menyebutkan beberapa aturan dan tata cara dalam melakukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka selaku aktor Pemerintah Daerah dalam negeri dengan Pemerintah Daerah luar negeri. Seperti pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, dijelaskan syarat yang terkait dalam peraturan sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) bahwa :

- a. mempunyai hubungan diplomatik antar kedua pemerintah daerah;
- b. merupakan urusan dan atau kepentingan pemerintah daerah;
- c. Pemerintah daerah tidak dapat membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- d. Pemerintah daerah di luar negeri tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan Pemerintah Dalam Negeri;
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah.

Selain persyaratan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1), kerja sama yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dialihkan kepada sumber daya manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2). Serta

persyaratan yang terdapat pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan “Kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri atau lembaga luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- a. kesetaraan tingkat administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
- b. kedua pemerintah daerah saling melengkapi; dan
- c. terdapat peningkatan hubungan dengan antar masyarakat.

Adapun tata cara atau tahapan yang dilakukan dalam kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 yakni “kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri atau lembaga luar negeri harus memenuhi tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan kehendak kerja sama;
- d. perancangan rencana kerja sama;
- e. persetujuan DPRD di daerah setempat;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan naskah kerja sama;
- h. pembahasan naskah kerja sama;
- i. persetujuan menteri;
- j. penandatanganan naskah kerjasama; dan
- k. pelaksanaan.

Praktik paradiplomasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1960 oleh Pemerintah Kota Bandung yang melakukan kerjasama dengan Kota Braunschweig, Jerman. Dan pada tahun 1985, paradiplomasi juga dilakukan Indonesia dengan Jepang khususnya dilakukan oleh Pemerintah DI. Yogyakarta dengan Provinsi Kyoto (Mukti, 2013:5). Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Jepang selama kurang lebih 60 Tahun lamanya.

Hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Jepang telah terjalin dimulai pada tahun 1958, dengan penandatanganan perjanjian damai antara Indonesia dengan Jepang yang dianggap dapat bermanfaat kedepannya bagi kedua belah negara (NusaKini,2018). Kemudian Jepang disetujui sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1960. Melalui program *Official Development Assistance* (ODA), Jepang menyumbang sejumlah bantuan luar negeri termasuk Indonesia, bantuan dana Jepang kepada Indonesia yang bernilai sejumlah USD14,28 Juta (Rp214,2 Milyar). Indonesia merasakan dampak lainnya yaitu mendapatkan transfer teknologi salah satunya pada sektor manufaktur dalam pemanfaatan produksi menggunakan robot oleh Jepang. (Indonesia.go.id, 2023).

Pertemuan-pertemuan kedua negara dilakukan dalam menjalin kerjasama strategis yang melibatkan *government to government*, untuk mengembangkan kerjasama hampir diseluruh sektor seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keamanan. Keberlanjutan dari kerjasama *government to government* di Indonesia menjadi dorongan terhadap aktor sub-negara untuk

melakukan kerjasama paradiplomasi dengan aktor sub-negara di Jepang. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, paradiplomasi Indonesia dan Jepang dimulai sejak lama, tepatnya oleh DIY dan Kyoto. Adapun daerah lain di Indonesia yang melakukan aktivitas paradiplomasi yaitu khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data yang dirilis Sekretariat Kabinet pada tahun 2023 mengenai kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sangat aktif dalam melaksanakan kerja sama dengan daerah-daerah di berbagai negara seperti Australia Selatan, Korea Selatan (Chungcheongnam, Seoul, Gyeongsangbuk-Do, dan Incheon Yoo Jeong-bok), Republik Rakyat Tiongkok (Guangxi Zhuang, Chongqing, Sichuan, dan Heilongjiang), Sudan (Khartum), Maroko (Souss Massa), Republik Demokratik Rakyat Aljazair (Setif), Rusia (Bashkortostan), dan khususnya Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka, Jepang.

Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Prefektur Shizuoka atau dalam bahasa Jepang yang disebut *Fuji No Kuni* yang merupakan bagian dari wilayah Tokai yang berada di pesisir Samudra Pasifik, Jepang. Jawa Barat memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Shizuoka (Bappeda, 2018), dan potensi yang dimiliki oleh Shizuoka ialah terdapat wisata alam Gunung Fuji yang menjadi ciri khas Jepang, sebagai penghasil perkebunan teh terbesar di Jepang dalam bidang pertanian, dikenal sebagai daerah berdirinya perusahaan industri otomotif (seperti Suzuki, Yamaha, dan Honda), terdapat teknologi dan infrastruktur yang sangat maju, sebagai kota industri yang tersebar beberapa

perusahaan di Shizuoka. Sedangkan, masalah yang dihadapi oleh Shizuoka ialah tengah mengalami krisis sumber daya manusia dengan kebutuhan tenaga kerja hingga hampir 300.000 SDM, mayoritas untuk 4.0 seperti *engineer*. (SindoNews, 2020). Diperkirakan bahwa Prefektur Shizuoka akan terus membutuhkan tenaga kerja asing khususnya tenaga kerja imigran asal Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun bahkan beberapa puluh tahun kedepan.

Potensi yang dimiliki daerah kemudian mendorong aktor sub-negara ini untuk menyelesaikan sejumlah masalah dan peluang yang terjadi di daerahnya baik di sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, maupun sumber daya manusia. Salah satu masalah dan potensi yang menjadi perhatian di provinsi Jawa Barat adalah sumber daya manusia. Populasi di Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023) yang merupakan jumlah penduduk terbanyak yang berada di Indonesia.

Permasalahan Sumber Daya Manusia yang dialami oleh Jawa Barat Berdasarkan data yang dipaparkan opendata.jabarprov.go.id tahun 2022, total Jumlah Pengangguran Terbuka adalah 2.125.606 akibat tingkat partisipasi pendidikan formal yang sangat rendah menyebabkan hampir seluruh SDM Jawa Barat berlari ke sektor informal. Sisanya, disebabkan oleh lemahnya daya saing yang mengakibatkan tingkat pengangguran di Jawa Barat cukup tinggi. Penyebab terjadinya ketimpangan sosial di wilayah Jawa Barat disinyalir karena Pemerintah kurang merespons dampak dari peningkatan pembangunan. Berbagai terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dalam peningkatan pembangunan harus dikaitkan dengan kebijakan perencanaan SDM. (BPSDM Jabar, 2023).

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan paradiplomasi dalam menangani isu sumber daya manusia sebagai salah satu upaya terobosan Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas SDM di Jawa Barat mengingat Jawa Barat diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 52 juta jiwa pada 2025, dengan kecenderungan urbanisasi meningkat menjadi sekitar 83% dan mengalami bonus demografi. Hal tersebut yang menjadi perhatian dalam riset ini mengenai paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat terhadap prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia. (BPSDM Jabar, 2023).

Melihat Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerja sama dengan Prefektur Shizuoka. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka pada tanggal 2 November 2017, yang di mana sebelumnya sudah melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tanggal 19 November 2016 (Bappeda, 2017). Sehingga pada akhirnya dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dalam bidang kerjasama ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.

Kesepakatan Letter of Intent (LoI) pertama kali telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka pada tanggal 19 November 2016 sebagaimana mustinya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 25 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (15) bahwa “Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan Letter of Intent (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak yakni, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.” Untuk menandakan telah memulai untuk dilakukannya kerja sama yang akan berkelanjutan sesuai dengan naskah kesepakatan.

Selanjutnya dalam menindaklanjuti kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga kerja sama dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (16) bahwa “Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Prefektur Shizuoka atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama”. Yang telah disepakati dalam MoU, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan yaitu dalam pendidikan, pertukaran mahasiswa antara Sekolah Keperawatan Universitas Shizuoka dengan Universitas Pajajaran. Mengingat Universitas Shizuoka hanya memiliki 120 calon perawat dan Jawa Barat memiliki ribuan mahasiswa di bidang keperawatan, kemudian dapat

melakukan pertukaran mahasiswa untuk mendapatkan standarisasi keperawatan Jepang atau keperawatan internasional. (PikiranRakyat, 2017). Sementara dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat, membuka kesempatan bagi masyarakat Jawa Barat untuk memperoleh *transfer of knowledge* di berbagai bidang, dan dapat memanfaatkan perusahaan-perusahaan Shizuoka untuk membuka peluang kerja bagi sumber daya manusia di Jawa Barat. (Bappeda,2018).

Selain itu, pada bulan Desember 2020 digelar kegiatan *Since We Meet Shizuoka* yang bertempat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung. Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkenalkan juga program kegiatan “*Shizuoka Desk*”, yakni program layanan konsultasi pra-investasi dan pasca-investasi bagi investor asal Prefektur Shizuoka yang beroperasi di Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang, termasuk Prefektur Shizuoka merupakan salah satu investor terbesar di Jawa Barat. Jepang menyumbang sejumlah bantuan luar negeri termasuk kepada Indonesia, bantuan dana Jepang kepada Indonesia yang bernilai sejumlah USD14,28 Juta (Rp214,2 Milyar) pada Tahun 1960, melalui program Official Development Assistance (ODA). Indonesia merasakan dampak positif yaitu mendapatkan transfer teknologi salah satunya pada sektor manufaktur dalam pemanfaatan produksi menggunakan robot yang diciptakan oleh pihak Jepang. (Indonesia.go.id, 2023). Dengan adanya transfer teknologi yang diberikan Shizuoka kepada Provinsi Jawa Barat, akan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia Jawa Barat serta akan meningkatkan hubungan persahabatan antara Prefektur Shizuoka dengan Provinsi Jawa Barat dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Shizuoka Desk tersebut memberikan pandangan yang baik bagi investor asal Shizuoka kepada Jawa Barat, karena telah memberikan pelayanan yang baik untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap setiap investor Shizuoka yang berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga atas pandangan yang positif terhadap Jawa Barat, Shizuoka akan terus melakukan investasi jangka panjang di Provinsi Jawa Barat serta memberikan keuntungan bagi masyarakat Jawa Barat khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi.

Adapun kegiatan event *Since We* yang terdiri dari delapan kegiatan yang diselenggarakan pada 17-18 Desember 2020 antara lain 1. Business Expo & Webinar; 2. Coaching Clinic bersama Shohei Matsunaga; 3. Education Fair; 4. Lomba menggambar dan mewarani Gunung Fuji; 5. UNESCO Global Geopark Webinar; 6. Kompetisi anime; 7. Kompetisi karate kata; 8. Pengumuman “*working in Shizuoka*”. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong konektivitas dan hubungan dengan Shizuoka yang akan terus berkelanjutan. (TerasJabar, 2020).

Hubungan kerja sama Jawa Barat dengan Shizuoka masih dalam tahap berkelanjutan hingga saat ini, serta merealisasikan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni “Jabar Juara lahir dan batin” (ReJabar, 2023). Kerja sama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan maksud untuk mewujudkan visi “Jabar Juara Lahir Batin” melalui inovasi dalam berkolaboratif dengan mitra sub-nasional negara lain.

Jawa Barat terus menyokong dalam peningkatan pembangunan yang salah satunya yaitu sumber daya manusia. Pada tanggal 19-20 Januari 2023, diselenggarakan kembali kegiatan bursa kerja atau *job fair work in Shizuoka, Fuji No Kuni* (Shizuoka dan Yamanashi) *Mensetsu Kai* di Kota Bandung yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah dilaksanakan bersama Pemerintah Prefektur Shizuoka. *Mensetsu Kai* pada tahun 2023 ini mencapai kurang lebih 5.000 orang, di mana pada tahun sebelumnya hanya mencapai 1.350 orang yang mendaftar dan yang diterima sedikit, yakni hanya 38 orang karena keterbatasan Covid-19. Program kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari kerja sama *sister province* antara Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka. Meskipun terjadi hambatan pada masa pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengupayakan dalam memaksimalkan keberlangsungan program kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan yang terbaik untuk kelancaran program kegiatan kerja sama antara Prefektur Shizuoka dengan Provinsi Jawa Barat (ReJabar, 2023).

Program bursa kerja di dukung melalui Disnakertrans Jawa Barat, terdapat perusahaan-perusahaan Shizuoka yang datang untuk mencari para tenaga kerja dengan terdiri dari 10 jabatan yang paling diminati oleh calon pekerja migran dan sangat dibutuhkan di Jepang yaitu antara lain designer multimedia (66,22 persen), digital marketer (56,32 persen), perawat (56,32 persen), housekeeper (51,42 persen), chef (47,22 persen), dan agriculture worker (46,72 persen). Oleh karena itu, Disnakertrans Jawa Barat menyiapkan skema pelatihan untuk ke sepuluh jabatan tersebut (ReJabar, 2023).

Adapun bentuk hasil dari rekrutmen job fair offline yang dilakukan pada tahun 2019 sebagai program kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Shizuoka yaitu saudara Sakti berasal dari Kota Bandung yang berposisi sebagai *Sales and Marketing Officer*, kemudian Joshua dan Alkaf berasal dari Kota Bekasi yang berposisi sebagai Teknisi/*Engineer*. Ketiga pekerja migran asal Jawa Barat tersebut menyampaikan antusiasmenya setelah diterima oleh Perusahaan Kyoritsu Electric dan berharap pemuda Jawa Barat lain dapat bergabung untuk berkarya di Shizuoka, sehingga saat kembali ke Indonesia dapat membangun Jawa Barat dan Indonesia (Disnakertransjabar, 2022).

Program bursa kerja yang paling disoroti dalam aktivitas kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka, karena suatu program kegiatan yang berkelanjutan dari tahun ke tahunnya sesuai dengan kesepakatan yang dibangun oleh kedua pemerintah daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengupayakan untuk kelancaran program bursa

kerja di Jawa Barat dan memaksimalkan program kegiatan yang dilaksanakan, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Riset tentang Paradiplomasi sudah banyak dilakukan. Untuk menegaskan kebaruan dari riset ini, penulis merujuk beberapa riset terdahulu dengan melakukan telaah pustaka dan pengelompokan sesuai dengan topik pembahasannya yang memperlihatkan kebaruan dari topik riset yang diangkat dalam riset ini.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu pada tahun 2021 oleh Mutiara Liza Trianggita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Kerjasama Sister Province Pemerintah Jawa Barat Dengan Prefektur Shizuoka Tahun 2014-2015”. Penelitian tersebut membahas mengenai alasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kerjasama dengan Prefektur Shizuoka, dimulai sejak sebelum terjadinya Letter of Intent (LoI) hingga pada saat setelah terjadinya penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah peneliti sama-sama membahas kerjasama Pemerintah Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka, Jepang. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian ini, peneliti lebih fokus membahas paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam sektor sumber daya manusia, yaitu seperti pertukaran pelajar, job fair, dan pelatihan tenaga kerja.

Penelitian lainnya pada Tahun 2016, oleh Alfi Faridah Tunnisa dari Universitas Al-Ghifari dengan judul penelitian yaitu “Kerjasama Sister Province Pemerintah Jawa Barat Dan Shizuoka Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah peneliti sama-sama membahas mengenai kerjasama Pemerintah Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka, Jepang. Namun, yang mejadi perbedaannya ialah pada penelitian tersebut fokus membahas kerjasamanya dalam sektor sumber daya manusia ketenagakerjaan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahaas paradiplomasi Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam sektor pertukaran pelajar, job fair dan pelatihan tenaga kerja.

Penelitian lainnya terjadi pada Tahun 2018, oleh Faruq Fahreza dari Universitas Mulawarman dengan judul penelitian yaitu “Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus: Pelatihan Kerja Technical Intern Training Program-TITP Sektor P, PERIKANAN, DAN KONSTRUKSI)”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah peneliti sama-sama membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam pengembangan sumber daya manusia dalam sektor pelatihan kerja. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas kerjasamanya antar negara dengan fokus pembahasan pada pelatihan kerja Technical Intern Training Program pada sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Prefektur Shizuoka, Jepang dalam

program job fair, pertukaran pelajar, dan pelatihan.

Adapun mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti selama menempuh pendidikan di program studi hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Komputer Indonesia yang membantu peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Pengantar Hubungan Internasional

Mata kuliah ini mempelajari dasar ilmu dalam hubungan internasional yang mendasari dalam aktivitas hubungan antar negara di dunia internasional. Dalam aktivitas hubungan internasional sendiri terdapat peran yang paling utama yaitu negara, aktor negara, dan organisasi internasional. Dalam penelitian ini memiliki korelasi terhadap mata kuliah ini yaitu di mana, Republik Indonesia dan Jepang menjadi aktor hubungan internasional, beserta kerja sama yang dilakukan menjadi aktivitas hubungan internasional.

2. Diplomasi dan negosiasi

Mata kuliah ini mempelajari mengenai perilaku dalam hubungan internasional, di mana suatu aktor negara maupun aktor sub-negara yang memiliki berbagai macam strategi dalam berdiplomasi dan bernegosiasi antar aktor hubungan internasional untuk mencapai kepentingan nasional maupun kepentingan daerah dalam lingkup ilmu hubungan internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mencapai kepentingan daerah nya melalui paradiplomasi terhadap Prefektur Shizuoka dalam

meningkatkan sumber daya manusia.

3. Politik Luar Negeri RI

Dalam mata kuliah ini mempelajari mengenai Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara, yang pada dasarnya merupakan suatu aktivitas berupa strategi dasar dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri juga menjadi wadah dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan pemerintahnya di luar negeri.

4. HI di Asia Tenggara

Dalam mata kuliah ini mempelajari mengenai karakteristik dan kebijakan- kebijakan negara di Asia Tenggara. Pada perkembangan globalisasi yang sangat pesat dari dahulu hingga saat ini, ASEAN telah sukses mencapai tujuannya dengan melaksanakan peningkatan hubungan kerjasama antar negara anggota, maupun dengan negara Asia lainnya seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan sebagainya. Kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas baik dalam segi ekonomi, pendidikan, budaya, pariwisata, perubahan iklim, dan lain-lain.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Rumusan masalah dalam riset ini adalah: Bagaimana Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Prefektur

Shizuoka Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia?

1.2.2 Rumusan Mikro

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia?
3. Bagaimana hasil kegiatan paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi dalam penelitian ini pada tahun 2018-2023 dengan memfokuskan dalam bidang pertukaran pelajar, job fair dan pelatihan. Karena, pada rentang waktu tahun tersebut merupakan setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana hasil dari kegiatan paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan paradiplomasi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka

dalam meningkatkan sumber daya manusia.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia.
3. Untuk menganalisis hasil kegiatan paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Prefektur Shizuoka dalam meningkatkan sumber daya manusia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang sama, dan menambah wawasan mengenai paradiplomasi Pemerintah Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka dalam sektor sumber daya manusia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Ada pun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak Pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan kerjasama melalui paradiplomasi dengan Prefektur Shizuoka dan terus menciptakan ide-ide dalam meningkatkan kualitas Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi lain untuk menjalin hubungan kerjasama luar negeri melalui *sister province* yang dapat meningkatkan kualitas daerah Provinsi nya masing-masing.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca, terutama bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional mengenai paradiplomasi Pemerintah Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka dalam sektor sumber daya manusia

